

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Kebijakan politik perang Amerika masa pemerintahan George Walker Bush ini menuntut prioritas pembangunan militer lebih besar. Sehingga otomatis meningkatkan anggaran pemerintah untuk dialokasikan pada militer yang akhirnya menjadikan kemunduran ekonomi Amerika dan terabaikannya kesejahteraan sosial rakyat. Fenomena ini bertentangan dengan konsep pembangunan *welfare state* yang dipegang Amerika. Oleh karena itu “Kebijakan Politik Perang dan Penurunan Tingkat Kesejahteraan Sosial di Amerika Pada Masa Pemerintahan Bush” sebuah judul yang dapat mewakili kajian masalah yang menarik untuk dibahas, yakni “kemiskinan yang meningkat di negara nomor satu dunia” yang ditunjukkan oleh penurunan tingkat kesejahteraan sosialnya.

#### **B. Latar Belakang Masalah:**

Istilah kapitalisme berarti kekuasaan ada di tangan kapitalis, sistem ekonomi bebas tanpa batas yang didasarkan pada keuntungan, dimana masyarakat bersaing dalam batasan-batasan ini. Terdapat tiga unsur penting dalam batasan-batasan dalam kapitalisme yakni pengutamaan kepentingan pribadi (*individualisme*), persaingan (*kompetisi*), dan pengerukan keuntungan. *Individualisme* penting dalam kapitalisme karena manusia melihat diri mereka sendiri bukanlah bagian dari bagian masyarakat, tetapi sebagai seorang individu yang berjuang sendiri dan harus berjuang untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Masyarakat kapitalis adalah arena dimana para individu berkompetisi satu sama lain dalam kondisi yang sangat sengit dan kasar. Ini adalah arena pertarungan dimana yang yang kuat akan tetap hidup sedangkan yang lemah dan tak berdaya akan terinjak dan musnah, seperti kompetisi biologi yang dijelaskan Darwin.<sup>1</sup> Menurut cara berpikir yang dijadikan dasar berpijak kapitalisme, setiap individu (dapat berupa seseorang, perusahaan, bahkan suatu bangsa) harus berjuang demi kemajuan dan kepentingan sendiri, dan yang paling menentukan dalam perang ini adalah produksi. Produsen yang unggul akan dapat bertahan hidup sedangkan yang lemah akan tersingkir dan mati, dan tidak peduli bahwa yang tersingkir adalah manusia. Sebaliknya yang dianggap lebih penting adalah pertumbuhan ekonomi dan barang-barang, yakni produk dari pertumbuhan ekonomi, karena kapitalisme hanya menyeret manusia untuk menyembah kepada uang dan kekuatan yang bersumber dari uang. Mentalitas kapitalis tidak merasa ada tanggung jawab moral atau hati nurani atas orang-orang yang terinjak dibawah kaki mereka dan yang harus hidup dengan berbagai kesulitan.

Amerika merupakan sebuah negara demokrasi liberal yang menganut sistem ekonomi pasar bebas, dan menanamkan pengaruhnya ke seluruh dunia, terlebih dengan statusnya sebagai negara 'super power'. Amerika mencanangkan sistem perdagangan internasional berdasarkan General Agreement of Tarrif and Trade (GATT) dan kestabilan sistem keuangan berdasarkan sistem Bretton Wood. Keikutsertaan Amerika dalam perdagangan dunia membuka peluang bagi produsen Amerika untuk menjual produknya ke luar negeri dan memberikan pilihan produk

---

<sup>1</sup> <http://www.wsws.org/id/1999/mar1999/ind2-m17.shtml>

yang luas bagi pada masyarakat Amerika Serikat. Belakangan ini para pemimpin Amerika menyadari betul bahwa persaingan dari produsen asing membantu menekan harga sejumlah harga barang untuk mengurangi laju inflasi.

Orang Amerika berpendapat bahwa perdagangan bebas juga menguntungkan negara lain berdasarkan pendapat ekonomi yang mengatakan bahwa 'perdagangan memungkinkan negara-negara untuk berkonsentrasi memproduksi barang dan jasa yang dapat mereka buat seefisien mungkin untuk meningkatkan kapasitas produksi keseluruhan masyarakat negara tersebut', meski pada kenyataannya sebagian besar negara berkembang yang menjadi targetnya belum siap secara moral maupun fisik untuk menerapkan sistem yang dianut AS. Lebih jauh Amerika yakin bahwa 'perdagangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan demokrasi di tiap negara dan juga perdagangan dapat meningkatkan kemakmuran dunia, kejayaan hukum, dan perdamaian antar negara'.<sup>2</sup>

Kemudian sistem perdagangan terbuka mewajibkan negara-negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Untuk itu Amerika Serikat bersedia membuka aksesnya kepada negara-negara lain apabila mereka juga melakukan hal yang sama dengan mengurangi batasan dagangnya, baik sebagai bagian dari kesepakatan bilateral maupun multilateral. Amerika juga sering mendesak negara-negara lain untuk menderegulasi industri mereka dan bertindak untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang ada transparan, tidak diskriminatif terhadap perusahaan asing, dan konsisten dengan praktek internasional.

---

<sup>2</sup> *Garis Besar Ekonomi AS*, Office of International Information Program, U.S. Department of State.

Berdasarkan prinsip perdagangan yang dianutnya dan seiring dengan meningkatnya industri, produsen-produsen Amerika mulai banyak beroperasi menyebar ke negara-negara di luar Amerika khususnya di negara-negara dunia ketiga yang sedang berkembang dimana tenaga kerja melimpah dengan upah rendah serta kaya akan bahan mentah murah yang akan digunakan sebagai modal usahanya. Hal ini juga didukung dengan tingginya tingkat produktivitas pertanian di AS sehingga memungkinkan surplus untuk diinvestasikan dalam pembangunan industri, apalagi AS mempunyai mesin-mesin canggih dan otomatisasi untuk melipatgandakan hasil kerjanya.

Pengusaha Amerika berinvestasi ke luar Amerika dalam bentuk perusahaan multinasional ataupun saham sebagai upaya mengembangkan produksinya untuk memperoleh laba sebanyak mungkin. Sementara itu negara-negara berkembang belum siap oleh persaingan pasar bebas dikarenakan sumber daya manusia dan teknologi yang masih dalam tahap perkembangan menuju maju, dan sangat memerlukan dana untuk pembangunan negaranya. Oleh sebab itu, masuknya investor asing yang menanamkan modalnya di negara pinggiran seperti halnya Indonesia dianggap sangat menguntungkan karena negara berkembang memerlukan modal untuk pembangunan, meskipun negara kapitalis menuntut berbagai syarat yang mempengaruhi pengambilan kebijakan domestik negara yang dituju, salah satunya adalah mau mengadopsi perekonomian berdasarkan pasar bebas.

Dominasi Amerika dalam ekonomi nampak pada IMF dan World Bank (WB) yang memberikan pinjaman finansial dengan bunga tinggi. Perusahaan multinasional beroperasi di Indonesia mengeksploitasi sumberdaya alam (SDA) digunakan bahan



bagi 2,2 juta warganya. Keadaan ini dilihat sebagai akibat dari menurunnya tingkat kesejahteraan sosial rakyat Amerika yang dapat dilihat dari tutupnya banyak perusahaan yang mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Negara-negara bagian dan daerah distrik mengalami defisit terdalam, terjadi kenaikan harga-harga dan bea cukai, serta pemangkasan kebutuhan-kebutuhan publik seperti keperluan untuk dana sekolah, perpustakaan, dinas pemadam kebakaran dan kepolisian, dinas kebersihan, kesejahteraan anak-anak, kesehatan dan pelayanan untuk orang tua lanjut usia.<sup>4</sup>

Hal tersebut terjadi sejak munculnya kebijakan pemerintah terhadap perang global, invasi atas Iraq dan Afghanistan, dan perang melawan terorisme. Kebijakan perang ini menyebabkan perlunya pendanaan militer yang besar, sehingga mendorong pengalokasian dana yang seharusnya digunakan sebagai dana sosial untuk biaya pembelanjaan militer dalam rangka perang. Maka dampak yang ditimbulkan adalah turunnya tingkat kesejahteraan sosial yang menyebabkan angka kemiskinan rakyat Amerika menjadi semakin meningkat.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan kebijakan politik perang Amerika sehingga mengakibatkan kemerosotan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat, kemudian mengetahui jawaban atas meningkatnya kemiskinan di Amerika Serikat seiring dengan popularitas presiden Bush.

---

<sup>4</sup> Nader, *In the Public Interest: Overspending on The Military*, 011703., Nader, 17 Januari 2003, didownload 18 April 2006, <<http://www.nader.org/interest/0117013.htm>>.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Amerika dapat mewujudkan konsep *welfare state* yang selama ini menjadi prinsip pembangunan Amerika, bagi negaranya.

#### **D. Pokok Masalah**

Amerika Serikat sebagai penganut sistem ekonomi pasar bebas menanamkan pengaruh paham kapitalisme ke seluruh dunia dengan konsekwensi yang diraih adalah kemakmuran dan kesejahteraan, akan tetapi “mengapa angka kemiskinan di AS semakin meningkat?”.

#### **E. Kerangka Dasar Teori**

Sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan penelitian ini digunakan teori, yakni teori yang berkaitan dengan perang dan pendanaan militer. Teori tersebut adalah:

##### **1. Konsep Kelompok Kepentingan (*interest group*)**

Pendekatan kelompok diperkenalkan oleh Arthur Bentley dalam *The Process Government* yang terbit pertama kali tahun 1908, yang menyatakan bahwa “masyarakat merupakan kompleks kelompok-kelompok yang tersusun”.<sup>5</sup> Dan menurut Bentley, bahan dasar bagi studi politik tidak bisa ditemukan dalam kitab undang-undang, konvensi konstitusional, essei, dsb., tetapi harus ditemukan dalam kenyataan empirik. Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh David Truman dalam *The Government Process*, bahwa “sistem sosial merupakan kumpulan mosaik

<sup>5</sup> Arthur F. Bentley, *The Process of Government: A Study of The Social Pressures*, University of Chicago Press, Chicago, 1908 dalam SP. Varma, *Teori Politik Modern*, cetakan ke lima, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 228.

dari berbagai kelompok".<sup>6</sup> Dan masih banyak lagi ilmuwan yang mengembangkan pendekatan kelompok, seperti para teoritis behavioralis seperti Samuel Eldersveld, Gabriel Almond, Mancur Olson, Joseph La Palombara, Myron Weiner, Fred W. Riggs, dll.

Para teoritis kelompok ini memusatkan perhatian pada perilaku politik dan unsur-unsur empirik dalam kehidupan politik.<sup>7</sup> Dalam makna konseptual, bahasa kelompok kepentingan bukan hal asing dalam ilmu politik. Kepentingan dapat diartikan sebagai tuntutan atau keinginan yang diinginkan bersama. Sedangkan kelompok berarti sekumpulan atau kesatuan individu.<sup>8</sup> Sehingga kelompok kepentingan adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi yang berusaha untuk memperjuangkan suatu "kepentingan" dan "mempengaruhi lembaga-lembaga politik" agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya, *Military Industrial Complex* (MIC) merupakan salah satu contoh nyata dari pendekatan kelompok tersebut. Sesungguhnya MIC ini juga merupakan sebuah konsep pemikiran yang dikembangkan oleh teoritis elit berdasar pengamatan atas perpolitikan dalam penentuan kebijaksanaan militer luar negeri Amerika Serikat. Pengamatan tersebut menghasilkan eksplanasi tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Maka untuk mengetahui sifat agresif Amerika melibatkan diri dalam perang, para teoritis menelaah siapa saja yang terlibat dalam

---

<sup>6</sup> David Truman, *The Government Process*, Knopf, New York, 1964, hal. 32. dalam *ibid.*

<sup>7</sup> Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 42.

<sup>8</sup> Robert Linebery, *Government in America: People, Politics, and Policy*, 2<sup>nd</sup> edition, Little Brown and Company, Canada, 1983, hal 286.

<sup>9</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1977, hal. 162.

proses pembuatan keputusan tentang masalah pertahanan. Dan berhasil ditemukan adanya koalisi elit yang kuat yang selalu mendukung peningkatan anggaran belanja pertahanan.

Kelompok kepentingan MIC ini terdiri dari kelompok militer profesional, manajer dan pengusaha atau industrialis yang usahanya terkait dengan penyediaan barang dan jasa militer, pejabat pemerintahan dan distrik yang karirnya diuntungkan oleh keuntungan-keuntungan militer. Kelompok MIC ini diikat kuat oleh kepentingan ekonomi yang kuat yaitu “peningkatan anggaran belanja militer”, didukung oleh kekuatan lobby yang ampuh dan hampir selalu berhasil menembus Kongres.<sup>10</sup> Hubungan pribadi diantara para elit itu pun terjalin sangat erat, bahkan masing-masing elit tersebut berganti kedudukan. Misalnya, banyak bekas pejabat departemen pertahanan Amerika menduduki jabatan pimpinan dalam perusahaan-perusahaan industri militer, dan sebaliknya banyak para manajer perusahaan tersebut beralih profesi duduk di kursi birokrasi militer maupun sipil Amerika Serikat. Selain menggunakan lobby demi kepentingan ekonominya, MIC menerapkan penciptaan “ideologi konflik” untuk meyakinkan pihak legislatif supaya menyetujui biaya militer yang tinggi.<sup>11</sup>

Dengan konsep pemikiran kelompok kepentingan yang berwujud *Military Industrial Complex* demikian, pemerintah dapat memutuskan untuk mengeluarkan anggaran besar untuk militer.

## 2. Kerangka Pemikiran Pendanaan Militer (*Military Expenditure*)

<sup>10</sup> Mohtar Mas' oed, *op. cit.*, hal.58.

<sup>11</sup> Harwanto Dahlan, *Military-Industrial Complex Amerika Serikat*, (Laporan Hasil Penelitian), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL UMY 1993

Kerangka pemikiran ini dipaparkan oleh seorang ilmuwan wanita Ruth Leger Sivard dengan argumennya:

“Social needs are too explosive. In a world spending over \$600 billion a year on military programs, over 1 billion people lack basic health care, one adult in four is unable to read and write, one-fifth of the world population goes hungry every day.”<sup>12</sup>

Argumen tersebut menyatakan pada intinya adalah bahwa “pengeluaran militer yang berlebihan menyebabkan kemerosotan kesejahteraan sosial”. Hal ini disebabkan karena kebijakan pemerintah menitikberatkan pada program militer untuk keamanan atau perang dan tidak berpihak pada rakyat, yakni mengabaikan sektor kerakyatan non militer seperti kesehatan, pendidikan, pangan, perumahan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian Sivard menerapkan kerangka berpikirnya dengan berbagai topik permasalahan berbeda yang berkaitan dengan pendanaan militer pada suatu negara.

Kedua kerangka pemikiran tersebut merupakan ‘koneksitas’ dengan permasalahan penelitian, naiknya angka kemiskinan di Amerika, yang diaplikasikan pada keadaan senyatanya. Keadaan Amerika saat ini dapat dianalogikan dengan masa perlombaan senjata strategis antara Uni Soviet dan Amerika Serikat begitu manakjubkan sehingga mengurangi biaya untuk rumah sakit, sekolah-sekolah, pertanian modern, penelitian medik, dan program-program sosial, karena dana tersebut tersedot untuk peluru kendali baru. Begitu juga yang terjadi saat ini dimana Amerika melakukan invasi terhadap Irak tahun 2003 dan perang terhadap Afghanistan, banyak dana pembangunan Amerika yang diselewengkan untuk biaya

---

<sup>12</sup> Ruth Leger Sivard, *World Military and Social Expenditures*, World Priorities Inc. Box 25140, Washington D.C., 20007, USA, 1993, 15<sup>th</sup> ed.

operasi militer dan perang di Irak serta pencegahan terhadap bioterorisme. Pendanaan militer yang dikeluarkan Amerika sejak 2001 hingga 2005 terus meningkat.

#### **F. Hipotesa**

Dengan uraian latar belakang masalah dan kerangka dasar pemikiran dapat diambil suatu hipotesa, bahwa pendanaan perang yang didorong oleh kelompok kepentingan MIC mengurangi alokasi dana kesejahteraan sosial sehingga memicu naiknya angka kemiskinan rakyat Amerika.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi penelitian supaya tidak terlalu luas dan bisa fokus kepada inti masalah, maka penelitian ini memfokuskan kenaikan angka kemiskinan pada masa satu periode pertama pemerintahan George Walker Bush yang mulai memerintah sejak 20 Januari 2001, hingga 20 Januari 2005.

#### **H. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan penulisan ini menggunakan metode yang sudah lazim dalam Hubungan Internasional dan dibenarkan secara ilmiah, yaitu menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini diambil dari berbagai informasi dengan data-data yang valid, yang diangkat dari jurnal, buku dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penulisan ini, terutama internet. Sedangkan angka kuantitatif berkaitan dengan angka-angka yang terkait dengan jumlah riil dan prosentase rakyat miskin dan angka

pembelanjaan militer, berdasarkan sensus yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sensus terkait di Amerika melalui situs internet dan buku.

### **I. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan penelitian ini, Bab I memaparkan tentang penjelasan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah yang diteliti, pokok masalah penelitian, kerangka dasar teori yang akan diaplikasikan dengan keadaan yang diteliti, hipotesa, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisannya.

Pada Bab II merupakan pembahasan penjelasan mengenai peranan Amerika seiring popularitas Bush dalam menentukan arah kepentingan Amerika dalam pendanaan militer yang berlebihan untuk tujuan perang.

Bab III berisi tentang realita angka dan jumlah kemiskinan di Amerika yang didorong oleh kemerosotan kesejahteraan sosial.

Bab IV merupakan aplikasi teori atau kerangka pemikiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi yang merupakan faktor pendukung kenaikan angka kemiskinan Amerika, yakni relasi antara kebijakan perang yang diambil oleh Bush dengan menurunnya tingkat kesejahteraan sosial, secara otomatis menunjukkan jumlah besar angka kemiskinan Amerika.